

Politik Aliran di Bali Pasca Soeharto

Gede Indra Pramana

(Mahasiswa Pascasarjana Politik Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada)

Email: gede.prama@gmail.com

Abstract

This paper tries to see the phenomenon of "politik aliran" in party politics in Bali. The key concept in the analysis of this paper begins from the understanding of the social cleavage on how the structure of society becomes the locus of the emergence of the party. After mapping the social locus where the social base of the party grows, attention will then be given to how the fundamental social conflict is manifested in the choices the party as a channel of interest. The research showed that the choice at the local level illustrates the pattern of choice at the national level, so that the configuration of local politics can be understood as a reflection of national politics. Issues and campaigns at the national level to influence the pattern of choice at the local level.

Keywords: politik aliran, political party, social cleavage, voting behavior

Abstrak

Tulisan ini berusaha melihat fenomena aliran dalam politik kepartaian dalam politik lokal di Bali. Konsep kunci dalam analisis tulisan ini berangkat dari pemahaman terhadap social cleavage atas bagaimana struktur masyarakat menjadi lokus kemunculan partai. Setelah memetakan lokus sosial masyarakat dimana basis sosial partai tumbuh, perhatian kemudian akan diberikan kepada bagaimana konflik sosial yang fundamental ini termanifestasi dalam pilihan-pilihan partai sebagai penyalur kepentingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pilihan di tingkat lokal menggambarkan pola pilihan di tingkat nasional, sehingga konfigurasi politik lokal dapat dipahami sebagai cermin dari politik nasional. Isu dan kampanye di tingkat nasional dapat memengaruhi pola pilihan ditingkat lokal.

Kata kunci: politik aliran, partai politik, pembelahan sosial, perilaku memilih

PENDAHULUAN

Tulisan ini berusaha melihat fenomena aliran dalam politik kepartaian. Dengan mengambil *setting* Bali, akan dilihat bagaimana transformasi konflik dalam sistem kepartaian dalam satu wilayah lokal. Pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan pada 1955 di Bali, Partai Nasionalis Indonesia (PNI) muncul sebagai partai dominan, disusul Partai Sosialis Indonesia (PSI), lalu Partai Komunis Indonesia (PKI). Kemunculan Orde Baru dengan

Golongan Karyanya secara mencolok mengubah peta politik di Bali. Hampir selalu dalam setiap Pemilu pada masa Orba, Golkar hampir selalu menang. Akan tetapi, secara signifikan hal ini berubah sejak runtuhnya Orde Baru. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) muncul sebagai partai yang dominan. Dari sini muncul anggapan bahwa Bali merupakan basis tradisional dari PDI Perjuangan. Padahal jika kita lihat ke latar sejarah, pada masa Orde Baru Soeharto misalnya, Golongan Karya (Golkar) hampir selalu menang Pemilu sejak

1971 hingga 1997. Bagaimana konfigurasi aliran dalam politik kepartaian di Bali? faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pergeseran pilihan partai politik ini?

Kajian tentang partai politik di Indonesia dengan menggunakan kerangka *cleavage* sosial sudah banyak dilakukan (Uffen, 2008, 2012; Baswedan, 2004; King, 2003). Semuanya melihat bagaimana hasil Pemilu 1999 dalam derajat tertentu memunculkan nuansa yang sama dengan hasil Pemilu 1955. Dalam konteks politik nasional, pembacaan kontemporer teoritis tersebut membantu kita melihat konteks politik aliran hari-hari ini. Meski demikian, apabila diterjemahkan dalam konteks lokal, dalam kerangka desentralisasi hari ini, pembacaan mereka hanya memperlihatkan kecenderungan umum dari orientasi pilihan partai politik. Padahal, justru dalam konteks lokal akan terlihat detail yang menguraikan politik kepartaian dalam suatu wilayah.

Dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menimbulkan orientasi pilihan partai politik, ada beberapa konsep kunci yang dapat membantu kita. Pertama, pemahaman terhadap *social cleavage* memberikan kita gambaran atas bagaimana struktur masyarakat yang menjadi lokus kemunculan partai. Setelah memetakan lokus sosial masyarakat dimana basis sosial partai tumbuh, perhatian kemudian akan diberikan kepada bagaimana konflik sosial yang fundamental ini termanifestasi dalam pilihan-pilihan partai sebagai penyalur kepentingan. Dalam melihat formasi pembentukan partai ini, penekanan akan diberikan kepada periode-periode menentukan yang memengaruhi pembentukan pola orientasi sistem kepartaian.

Karena itu, studi ini mempertimbangkan beberapa hal. Fokus perkembangan historis akan berusaha menunjukkan transformasi *cleavage* sosial menjadi partai di Bali. Hal ini dilakukan dengan menguraikan konteks historis yang memunculkan *cleavage*

sosial. Kemudian, fokus akan diberikan kepada bagaimana partai-partai politik di Bali memobilisasi *social cleavage* yang ada demi meraih suara.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini digunakan metode studi literatur. Data-data bersumber kepada berbagai sumber yang dapat diakses, seperti media, baik cetak maupun digital terkait sepak terjang partai-partai politik di Bali. Data-data tentang hasil Pemilu diambil melalui KPU dan juga dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder yang relevan, seperti hasil penelitian, buku, dan laporan akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam memahami politik aliran, konsep *social cleavage* yang ditawarkan Seymour M. Lipset dan Stein Rokkan membantu kita memahami bagaimana dasar pembentukan partai dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat. Struktur *cleavage* ini terbentuk berdasarkan perjalanan historis dengan menekankan terhadap konflik sosial yang fundamental. Lipset dan Rokkan (1967) menerjemahkan kerangka konflik ini dalam kaitannya dengan dua periode besar yang mengubah sosial masyarakat. Peristiwa pertama adalah revolusi nasional, dimana terjadi pertentangan antara pendukung kebudayaan yang tersentralisasi dan pendukung kebudayaan lokal. Periode ini juga ditandai dengan terbentuknya *cleavage* "agama-sekuler" dalam kerangka perlawanan yang sama terhadap kerangka dominasi gereja, terutama dalam bidang pendidikan. Peristiwa kedua adalah revolusi industri, yang memengaruhi pembentukan kerangka ekonomi primer (Urban) dan ekonomi sekunder (Rural). Pertentangan ini berlangsung antara kelas tuan tanah dan pengusaha yang membutuhkan lahan, satu

untuk mempertahankan pertanian dan perkebunan, yang satunya membutuhkannya untuk mengembangkan industri.

Model pembacaan yang ditawarkan Lipset dan Rokkan yang melihat transformasi sistem kepartaian ini akan lebih jelas, apabila terlebih dahulu kita memperhatikan basis sosial mana dari masyarakat yang membentuk pilihan-pilihan tersebut. Disinilah kajian Clifford Geertz menemukan relevansinya dalam membantu pemahaman kita. Dalam konteks masyarakat Jawa, Geertz menunjukkan terdapat pola-pola pengelompokan sosial dalam masyarakat, yang menjadi basis mobilisasi politik. Pengamatan Geertz dilakukan di Mojokuto, tentang bagaimana kaitan antara profesi, dan penggolongan penduduk menurut pandangan masyarakat berdasarkan kepercayaan, preferensi etnis dan pandangan politik. Hasilnya adalah ada tiga inti struktur sosial yakni desa, pasar dan birokrasi pemerintah yang mencerminkan tiga tipe kebudayaan, santri, abangan, dan priyayi. Struktur sosial desa “biasanya diasosiasikan kepada para petani, pengrajin dan buruh kecil –yang penuh dengan tradisi animisme upacara selamatan, kepercayaan terhadap makhluk halus, tradisi pengobatan, dan sihir menunjuk kepada seluruh tradisi keagamaan abangan. Sementara pasar “terlepas dari penguasaan etnis Cina yang tidak menjadi pengamatan Geertz diasosiasikan kepada petani kaya dan pedagang besar dari kelompok Islam berdasarkan kondisi historis dan sosial di mana agama Timur Tengah berkembang melalui perdagangan dan kenyataan yang menguasai ekonomi Mojokuto adalah mereka memunculkan subvarian keagamaan santri. Yang terakhir adalah subvarian priyayi. Varian ini menunjuk pada elemen Hinduisme lanjutan dari tradisi Keraton Hindu-Jawa. Sebagaimana halnya Keraton (simbol pemerintahan birokratis), maka priyayi lebih menekankan pada kekuatan sopan santun

yang halus, seni tinggi, dan mistisisme intuitif dan potensi sosialnya yang memenuhi kebutuhan kolonial Belanda untuk mengisi birokrasi pemerintahannya.

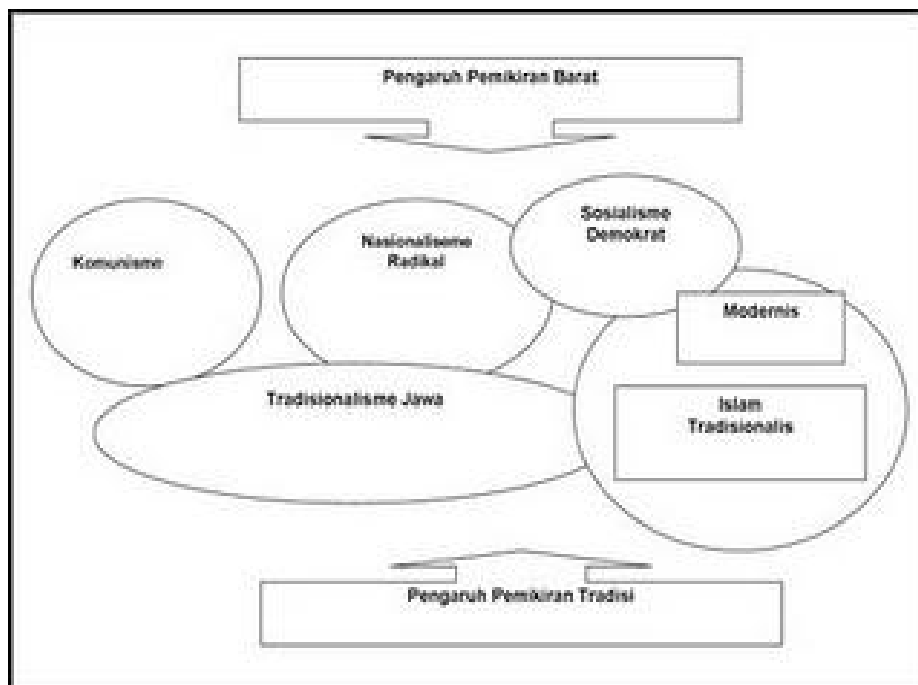
Berbagai kajian yang mencoba menggunakan perspektif aliran bermunculan pasca karya monumental Geertz. Adalah Herbert Feith yang berusaha menerjemahkan lebih lanjut konteks pembacaan Geertz dalam kerangka orientasi pilihan politik. Seperti Geertz, Feith (1966) menekankan perbedaan orientasi dasar, atau dalam istilah lain disebut “*Weltanschauliche Grundlagen*”, yaitu perbedaan basis ideologi antara satu partai dengan partai lainnya. Basis ideologis itulah yang menentukan tujuan, program atau platform, komposisi kepribadian dalam politik. Perbedaan basis ideologis di dalam semua hal tersebut di atas akan menentukan jarak politik dari kekuatan politik yang ada.

Pemetaan aliran versi Feith terlihat lebih “canggih” dibandingkan dengan model trikotomi (abangan, santri dan Priyayi) dari Geertz karena tidak seperti Geertz yang hanya melihat *tradisional-religio-political-system*, Feith melihat adanya dua sumber utama pemikiran politik di Indonesia. Pertama, bersumber dari tradisi (kebudayaan Hindu-Budha maupun Islam). Kedua, bersumber pada aliran pemikiran barat. Peluang bagi munculnya keragaman aliran politik dimungkinkan ketika muncul Maklumat Pemerintah yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta, tanggal 3 November 1945, yang menyatakan bahwa “Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat”. Selanjutnya Feith menyatakan bahwa berawal dua sumber utama pemikiran politik di Indonesia inilah kemudian muncul lima aliran politik yaitu:

- 1) Komunisme yang mengambil konsep-konsep langsung maupun tidak langsung dari Barat, walaupun mereka

- seringkali menggunakan istilah politik dan mendapat dukungan kuat dari kalangan abangan tradisional. Komunisme mengambil bentuk utama sebagai kekuatan politik dalam Partai Komunis Indonesia.
- 2) Sosialisme Demokrat yang juga mengambil inspirasi dari pemikiran barat. Aliran ini muncul dalam Partai Sosialis Indonesia.
 - 3) Islam, yang terbagi menjadi dua varian; kelompok Islam Reformis (dalam bahasa Feith) atau Modernis dalam istilah yang digunakan secara umum yang berpusat pada Partai Masjumi; serta kelompok Islam konservatif atau sering disebut tradisional yang berpusat pada Nahdhadul Ulama.
 - 4) Nasionalisme Radikal, aliran yang muncul sebagai respon terhadap kolonialisme dan berpusat pada Partai Nasionalis Indonesia (PNI).
 - 5) Tradisionalisme Jawa, penganut tradisi-tradisi Jawa. Pemunculan aliran ini agak kontroversial karena aliran ini tidak muncul sebagai kekuatan politik formal yang kongkret, melainkan sangat memengaruhicara pandang aktor-aktor politik dalam Partai Indonesia Raya (PIR), kelompok-kelompok Teosufis (kebatinan) dan sangat berpengaruh dalam birokrasi pemerintahan (pamong Praja).
- Kelima aliran itu muncul dalam diagram pemikiran politik antara tahun 1945-1965 yang dibuat oleh Herbert Feith (lihat diagram).

Diagram Lima Aliran Politik di Indonesia



Seperti dinyatakan dalam diagram diatas, perspektif inilah yang menjadi kerangka umum pembacaan model politik aliran di Indonesia. Andreas Uffen (2008) lebih jauh

menyediakan model pembacaan politik aliran dengan melihat hasil Pemilu 1999 dan Pemilu 2004. Uffen (2008) menggunakan *cleavage* sosial ala Lipset dan Rokkan untuk

membandingkan kiprah partai-partai pada Pemilu 1999 dan 2004, kemudian membandingkannya dengan hasil Pemilu 1955, Uffen sampai pada kesimpulan bahwa terdapat kontinuitas dalam aliran politik di Indonesia (lihat Tabel 1).

Tabel 1.
Perspektif *Cleavages* Partai Politik di Indonesia

	Golkar	PDI-P	PKB	PPP	PD	PK/PKS	PAN
Election results (in %)	22.5 (1999); 21.6 (2004)	33.8 (1999); 18.5 (2004)	12.6 (1999); 10.6 (2004)	10.7 (1999); 8.2 (2004)	7.5 (2004)	1.4 (1999); 7.3 (2004)	7.1 (1999); 6.4 (2004)
Center-Periphery	stronger on Outer Islands (most notably Sulawesi), also West Java	Java, Hindu Bali, Christian regions	especially East and Central Java	relatively nonspecific	Java (Jakarta), otherwise nonspecific	Java and several Muslim dominated regions on Outer Islands	Java (especially Yogyakarta) and numerous Muslim-dominated regions on Outer Islands
State-Church (secularist vs moderately politicized Islam vs Islamism)	secular but strong, especially modernist Muslim wing	Secular	moderately politicized Islam	Islamism	secular	Islamism	moderately politicized Islam
Urban-Rural (primarily expressed as modernist Islam vs traditionalist Islam)	nonspecific	Nonspecific	rural, traditionalist Islam	mostly rural, modernist Islam, with strong traditionalist branch	urban	urban, modernist Islam	urban, modernist Islam
Capital-Labor	administrative elites, professional; nonspecific regarding support from middle and lower classes	administrative elites, professional; strong support from lower classes	<i>ulama</i> (often owners and principals of Islamic boarding schools), strong support from rural lower classes	Muslim elites, strong support from lower classes	professional, mostly middleclass base	students and professional; mostly middleclass base	professional, Muslim elites; mostly middleclass base
Status quo <i>reformasi</i>	mostly status quo	<i>reformasi</i> , mostly status quo since about 2001	<i>reformasi</i> in specific policy areas	mostly status quo	<i>reformasi</i> in specific policy areas	<i>reformasi</i> in specific policy areas	initially <i>reformasi</i> ; today in specific policy areas

Sumber: King (2003); Ananta, Arifin and Suryadinata (2004); Ananta, Arifin and Suryadinata (2005); Sherlock(2005); Johnson Tan (2005); Tomsa (2006); Mujani and Liddle (2007). Dikutip dari Uffen, 2008, hal. 14.

Jika perspektif seperti yang telah dipaparkan di bagian sebelumnya digunakan dalam melihat pembentukan aliran di Bali, akan memunculkan beberapa problem. Pertama, konteks historis masyarakat lokal seperti Bali, tentunya berbeda dengan

masyarakat Indonesia umumnya, apalagi jika dibandingkan dengan masyarakat Jawa. Kedua, seperti yang akan kita lihat nantinya, hasil pemilihan ditingkat nasional berpengaruh dalam konfigurasi politik lokal. Karenanya, untuk lebih menyelami konteks

historis dari orientasi partai ini, diperlukan kajian lain dalam melihat dinamika politik aliran di tingkat lokal. Lebih lanjut, perlu dilihat konteks mobilisasi dalam kampanye yang dilakukan oleh partai-partai tersebut, sehingga berhasil dalam mentransformasi struktur sosial masyarakat dalam Pemilu. Geertz (1977: 22) memberikan uraian bagaimana pengorganisasian masyarakat Bali dalam kaitannya dengan ekspresi pilihan partai politik.

Pada umumnya di Bali, afiliasi politik itu cenderung mengikuti kesetiaan-kesetiaan tradisional, sehingga kelompok kekerabatan, desa, dan kelompok kasta yang bersaing berada di pihak-pihak yang secara politis saling bertentangan, dan dengan demikian hanya merupakan refleksi dari posisi mereka di dalam struktur sosial setempat. Sampai sekarang, daya tahan bentuk-bentuk sosial tradisional masih cukup kuat untuk memaksa proses politik nasional terealisasi menurut pengertian yang ada pertaliannya dengan keadaan di Bali sebenarnya.

Meskipun Geertz sampai pada kesimpulan bahwa politik aliran belum terbentuk di Bali, tetapi hasil Pemilu menunjukkan pengelompokan masyarakat dalam pola yang mengikuti aliran dalam konteks nasional. Geertz juga menguraikan bagaimana pengorganisasian sosial masyarakat Bali dalam sekaa. Sekaa adalah suatu kelompok sosial, dibentuk berdasarkan satu kriteria yang tunggal dan eksklusif, kriteria keanggotaan, dan dicurahkan untuk mencapai tujuan sosial yang tertentu dan biasanya agak khusus, misalnya keagamaan,

politik, ekonomi, atau apa saja (1977: 89). Geertz bahkan lebih jauh meletakkan sekaa ini sebagai suatu pranata sosial yang mengatur pengorganisasian masyarakat di Bali. Banjar, Desa, Subak, bahkan koperasi dibangun dalam kerangka Sekaa ini. Prinsip utama yang memungkinkan semua proses ini disebut oleh Geertz sebagai kolektivisme pluralistik. Persekutuan-persekutuan sosial yang silang menyilang itu berarti bahwa hampir tak ada seorang yang sepenuhnya terikat pada satu lembaga yang sungguh-sungguh komprehensif, tanpa kemungkinan kesetiaan pada yang lain, tempat orang mencari perlindungan dari tekanan-tekanan kelompoknamun tak pernah ada orang yang merasa perlu bertindak sendiri, lepas dari agregasi sosial yang terang batas-batasnya (Geertz, 1977: 89).

Puri merupakan pusat dimana kegiatan-kegiatan ini menemukan bentuknya yang paling utama. Puri adalah bagian dari suatu sistem keseluruhan masyarakat yang memungkinkan masyarakat itu melakukan pembagian kerja (produksi). Terdapat ikatan-ikatan yang menentukan hak dan kewajiban dalam susunan masyarakat. Disini hierarki dipandang sebagai fungsi, bukan konsekuensi dari pengaturan-pengaturan ini. Bentuk keseluruhannya hanya mungkin bisa berjalan jika semua bagian menyadari posisi, dan melakukannya. Jika tidak, maka seluruh keseimbangan dari proses ini akan hancur. Hal ini mungkin dapat ditemukan lebih jelas jika kita melihat hasil pemilihan umum pertama, tahun 1955 di Bali.

Tabel 2.

Kursi DPRD Bali yang diduduki Partai-Partai dan Kelompok-kelompok Fungsional, 1950, 1956, dan 1960

Tahun	KPNI	PNI	PSI	PKI	PRI	BP	MAS	NU	PK	MUR	IRMI	GF	Total
1950	11	9	-	-	-	-	6	-	-	-	3	7	36
1956	-	16	9	2	1	1	1	-	-	-	-	-	30
1960	-	7	-	1	-	1	-	1	1	1	-	13	25

Ket. KPNI= Kesatuan Pemuda Republik Indonesia; PNI= Partai Nasionalis Indonesia; PSI=Partai Sosialis Indonesia; PKI= Partai Komunis Indonesia; PRI= Partai Rakyat Indonesia; BP= Biro Pancasila; MAS= Masyumi; NU= Nahdlatul

Ulama; PK= Partai Katolik; MUR= Partai Murba; IRMI= Ikatan Rakyat Murba Indonesia;GF= Golongan Fungsional: pada 1950, Petani (2), Perempuan (3), Buruh (1); pada 1960, Petani (2), Perempuan (1), Buruh (2), Pemuda (1), pemimpin Agama (2), Veteran (1), Bisnis (1), Seniman (1), Militer (2). (Sumber: Untuk 1950, Berataputra, "Perwakilan Rakjat di Bali", 17 Februari 1951; untuk 1956, "Bunga Rampai Pemilihan Umum 1955", *Bali Post*, 6 April 1977; untuk 1960, *Suara Indonesia*, 9 Desember 1960. Dikutip dari Robinson, 2006, hal. 296-297.)

Tabel 3.
Persentase Jumlah Suara dan Jumlah Kursi di DPRD yang dimenangkan oleh Tiga Partai Besar (PNI, PKI, PSI) dalam Pemilu 1955

Kabupaten	Total Kursi	PNI		PKI		PSI		Lain-lain (a)	
		%	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%	Jml.
Buleleng	15	63,2	10	6,0	2	1,9	0	18,9	3
Jembrana	10	56,0	6	21,5	2	0,3	0	22,2	2
Tabanan	15	41,5	6	2,9	1	51,9	8	3,7	0
Badung	15	31,7	5	7,2	1	47,3	7	13,8	2
Gianyar	15	47,4	7	3,8	1	46,1	7	2,7	0
Bangli	12	67,2	8	0,4	0	30,0	4	2,4	0
Klungkung	11	68,8	8	8,9	1	10,8	2	11,5	0
Karangasem	15	57,7	9	6,1	1	27,6	4	8,6	1
Seluruh Kabupaten	108	51,4(b)	59	7,9 (b)	9	30,6 (b)	32	10,2	8

Ket.(a) Partai-partai lain yang memperoleh sejumlah suara termasuk Biro Pancasila, Masyumi, Partai Rakyat Indonesia, Partai Rakyat Nasional, Partai Buruh, PPPRI, NU, dan Partai Murba; (b) Pengambilan suara untuk Konstituante, pada Desember 1955, menunjukkan penurunan mencolok dalam dukungan untuk PSI sampai sekitar 25% dari suara yang sah, dan peningkatan persentase suara PNI (sampai 6%) maupun PKI (sampai 8,5%) (Sumber: Angka-angka ini dihitung berdasarkan "Daftar Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakjat Nusa Tenggara Barat". Sumber lain, "Bunga Rampai Pemilihan Umum 1955", *Bali Post*, 6 April 1977, menunjukkan sedikit perbedaan dalam jumlah total suara – dan persentase yang lebih besar untuk PKI. Dikutip dari Robinson, 2006, hal. 299).

Masing-masing partai terbesar di langgam nasional menjadi pilihan utama di Bali, PNI dan PSI, kemudian PKI. PNI pada khususnya dianggap merupakan partai Soekarno yang menarik kaum Republikan di Bali. Ada beberapa hal yang memungkinkan kemenangan PNI, pertama PNI sudah terlanjur diidentikan dengan sosok Soekarno, presiden pertama RI. Soekarno yang secara terbuka mengakui dirinya setengah berdarah Bali, karena ibunya merupakan seorang Brahmana dari Singaraja, turut mendongkrak popularitas PNI di tingkat massa.

Kedua, PNI di Bali secara resmi menentang berlanjutnya pelbagai lembaga dan praktik feodal. Pada awal dasawarsa 1950-

anmisalnya, PNI mengupayakan dihapuskannya pembatasan tertentu dalam perkawinan lintas kasta (Robinson, 2006: 316). Meski demikian, kaum bangsawan, yang secara tradisional memiliki basis massa yang kuat diterima sebagai anggota karena melihat potensi dukungan massa bagi partai. Ketiga, PNI juga dikenal sebagai partai pemerintah, sehingga keuntungan-keuntungan struktural ini menjadi pertimbangan dalam memilih partai. Kecenderungan bangsawan-bangsawan ini untuk masuk ke PNI pada akhirnya memengaruhi arah perkembangan partai menjadi lebih konservatif, dimana ketegangan dengan PKI yang melancarkan

kebijakan Land Reform berdasarkan UUPA 1960.

Kemenangan yang diperoleh PSI di beberapa daerah seperti Tabanan, Badung, dan bersaing secara ketat di Gianyar, tak lepas dari dukungan yang diberikan puri-puri lokal terhadap partai ini. Walaupun awalnya menimbulkan polemik, masuknya keluarga Puri di Gianyar secara signifikan mendongkrak perolehan suara partai ini dalam Pemilu. Posisi PSI yang semakin dikenal sebagai pengkritik pemerintah mendapat sambutan yang luas dalam konteks lokal. Sebelum akhirnya dilarang, akibat dicurigai dalam peristiwa-peristiwa pemberontakan di daerah pada akhir dekade 1950-an, partai ini merupakan menjadi penantang PNI yang kuat di Bali.

Periode otoriter Orde Baru ditandai oleh kampanye Soeharto guna mendongkel Soekarno, dengan memobilisasi Angkatan Darat untuk menyapu habis basis dukungan yang terutama berasal dari PKI. Kampanye ini berhasil membunuh kurang lebih 500.000 hingga 1.000.000 simpatisan dan anggota Partai Komunis Indonesia, yang merupakan partai legal yang berpartisipasi dalam Pemilu 1955. PKI dilarang, dan banyak tahanan politik korban keganasan Orde Baru dibuang ke Pulau Baru.

Semenjak Pemilu 1971, Orde Baru mulai mengontrol partisipasi dan kegiatan politik. Tahun 1972, Pemerintah menekan jumlah peserta Pemilu hanya dibatasi melalui fusi yang menghasilkan tiga kontestan, pertama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) hasil fusi lima partai politik yang ada sejak masa pemerintahan Soekarno (PNI, IPKI, PARKINDO, Partai Katolik, dan Partai MURBA). Kedua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) fusi partai berdasar Islam. Dan ketiga, Golongan Karya, suatu golongan fungsional yang dikembangkan oleh pemerintah Soeharto.

Partai pemerintah, Golkar, hampir selalu menang mutlak dalam setiap Pemilu di Bali. Usaha-usaha untuk memuakan pemerintah pusat juga dijalani secara mencolok, dengan menyukseskan program-program pembangunan pemerintah yang dijalankan melalui Golkar. Praktis tidak ada oposisi. Rakyat digerakan melalui kampanye pembangunan, dan terutama industri pariwisata. PDI hanya bertahan di beberapa daerah, dimana Puri Satria di Denpasar memang telah dikenal sebagai simpatisan PNI sejak tahun 1950-an (Dwipayana, 2004). Ketika rezim Orde Baru runtuh, seketika arus perubahan ini mengubah konfigurasi partai politik di Bali.

Tabel 4.
Persentase Jumlah Suara Partai Golkar dan PNI pada Pemilu 1971 di Bali

Partai	Golkar	PNI
1971	83	13,5

Sumber: Disadur dari Dwipayana, 2004, hal. 103

Tabel 5.
Persentase Jumlah Suara Golkar dan PDI periode Pemilu 1977-1997 di Bali

Partai	Golkar	PDI
1977	85	13
1982	88	10
1987	88	11
1992	78	20

Sumber: Disadur dari Dwipayana, 2004, hal.103

Runtuhnya Orde Baru mengantarkan rakyat Indonesia ke transisi menuju demokrasi. Pemilu 1999 ditanggapi dengan gegap gempita. PDI Perjuangan muncul sebagai pemenang mutlak dalam Pemilihan Umum kali ini. Dengan membandingkannya dengan pola pilihan pada Pemilu 1955, King (2003) menyatakan bahwa pola aliran ini kembali muncul di masyarakat.

Perubahan situasi politik inilah yang kemudian direspon secara cepat oleh berbagai kelompok, termasuk PDI yang mengadakan kongres kelima di Denpasar Bali 8 – 10 Oktober 1998, dan merekomendasikan untuk mengganti nama partai menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).

Sejak menyelenggarakan Kongres PDI Perjuangan di Bali tahun 1998, sosok partai baru ini menggambarkan dirinya sebagai partai Wong Cilik. PDI Perjuangan dibandingkan sebagai PNI, partai yang identik dengan Soekarno, ayahanda Megawati. Hal ini tak lepas dari sosok Megawati Soekarnoputri, putri Bung Karno yang selama tahun-tahun terakhir Orde Baru mengalami represi. Megawati digambarkan sebagai sosok oposisi populer terhadap Orde Baru dengan dukungan kelompok-kelompok yang lemah secara ekonomi dan politik sejak periode pemerintahan Soeharto.

Pada tahun 2000 dengan bekal kemenangan pada pemilu 1999, maka PDI Perjuangan pada tanggal 27 Maret – 1 April 2000 mengadakan Kongres pertama di Semarang yang menghasilkan piagam perjuangan PDI Perjuangan sebagai haluan politik bagi partai guna menyusun AD/ART, program-program partai, keputusan-

keputusan dan pedoman-pedoman partai lainnya.

Dalam upaya piagam perjuangan tersebut secara tersirat meneguhkan kembali komitmen Ideologi PDI Perjuangan sebagai partai politik yang mengusung gagasan-gagasan pemikiran Soekarno. Hal ini bisa dilihat dari azas partai yang digunakan yakni Pancasila yang bercirikan kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial (sosio nasionalisme-sosio demokrasi=Marhaenisme) serta berpegang teguh pada prinsip berdaulat di bidang politik, berkari bidang ekonomi dan berkepribadian didalam berbudaya (Trisakti).

Sosok Megawati juga semakin dekat dengan masyarakat Bali, ketika dirinya, dalam masa kampanye Presiden, dinyatakan tak layak karena bersembahyang di Pura. Statemen ini dikeluarkan oleh AM Saefuddin, Menteri Pangan dan Holtikultura (ketua PPP) waktu itu, yang menyatakan bahwa Mega bukanlah kandidat presiden yang kuat, karena selain dia perempuan, dia juga Hindu. Statemen ini mendapatkan reaksi keras, terutama dari umat Hindu di Bali. Pertentangan yang akut diantara pendukung Golkar dan PDI Perjuangan, yang mewarnai periode akhir 1998, menjadi mereda dan berbalik bersatu mengecam AM Saefuddin. Dalam suatu rapat akbar di Lapangan Puputan Renon Denpasar Bali yang diselenggarakan pada Oktober 1998, pendukung Golkar dan PDI Perjuangan makan bersama. Peristiwa ini menandai suatu rekonsiliasi umum, dan mengancam pemerintah Pusat dengan gerakan kemerdekaan Bali. Sebagaimana terlihat dalam tabel 5, pada Pemilu 1999, PDI Perjuangan menang mutlak di Bali.

Tabel 6.
Jumlah Suara dan Kursi Partai Pemilu Legislatif DPR 1999 di Bali

No	Partai	Persentase kursi	Jumlah kursi
1	PDI Perjuangan	77,78	7
2	Partai Golkar	11,11	1
3	PKB	11,11	1

Sumber: KPU, 1999 dikutip dari laporan IFES, 2000.

Kemenangan mutlak ini menandai suatu pergeseran orientasi pemilih di Bali. Dalam satu kali Pemilu, dukungan yang dulunya diberikan kepada Golkar berubah kepada PDI Perjuangan. Ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan yang baru sangat tinggi di tengah perubahan-perubahan yang berlangsung dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Visi partai yang mewakili "*wong cilik*" ini melekat, hingga Megawati menjadi presiden pada 2001.

PDI Perjuangan dianggap sebagai partai pemerintah. Kinerja pemerintahannya disorot, dan rakyat menunggu sejauh mana keberpihakan partai *wong cilik* ini kepada rakyat. Euforia kemenangan pemilu 1999 yang mengantarkan PDI Perjuangan pada puncak kekuasaan baik di legislatif maupun eksekutif dengan perolehan suara 35.689.073 suara atau 33,74% telah melahirkan berbagai persoalan baik di tingkat internal (korupsi, indisipliner, dan elitis) maupun di tingkat eksternal: kebijakan yang tidak pro rakyat seperti kenaikan BBM & tarif dasar listrik, penjualan asset publik (privatisasi BUMN) maupun amandemen terhadap UUD 1945 yang dianggap oleh banyak orang sebagai "amandemen kebablasan" dan mengarah

kepada liberal. Kebijakan-kebijakan tersebut telah melahirkan berbagai kritikan baik dari internal PDI Perjuangan sendiri, maupun kritikan dari pihak luar yang menganggap bahwa PDI Perjuangan telah meninggalkan identitasnya sebagai partai perjuangan (koreksi terhadap orde baru) dan partainya "*wong cilik*". Bahkan Putranto, Zae dan Simanjuntak menyampaikan bahwa kabar tentang kisruh antar kader di kandang Banteng justru lebih sering menghiasi halaman surat kabar, dan menjadi berita penting di radio dan televisi, ketimbang aksi riil PDI Perjuangan dalam mengatasi kemiskinan atau bencana alam. Misalnya, disaat pintu sudah terbuka untuk berperan bagi *wong cilik* dan bangsa Indonesia, PDIP justru terbelit oleh urusannya sendiri. Para elitnya malah saling jegal dan sikat.

Kekecewaan di tingkat massa tampak dengan penurunan suara perolehan pada Pemilu 2004. Meskipun secara umum PDI Perjuangan tetap dominan, kegagalan partai ini memimpin tampuk pemerintahan, dan tiadanya realisasi janji-janji perubahan secara langsung, menjadikan dukungan terhadap PDI Perjuangan menurun.

Tabel 7.
Pengumuman Jumlah Suara dan Alokasi Kursi DPR Pemilu 2004

Partai	Jumlah suara dari penghitungan manual	Jumlah suara dalam %	Alokasi kursi Suara penuh	Sisa Suara	Urutan suara sisa	Kursi dari alokasi suara sisa	Total Kursi	Persentasi kursi
PNI Marhaenisme	65.294	3,43	0	65294	5	0	0	0,00%
PBSD	5.475	0,29	0	5475	18	0	0	0,00%
PBB	4.155	0,22	0	4155	21	0	0	0,00%
Partai Merdeka	7.799	0,41	0	7799	16	0	0	0,00%
PPP	17.226	0,90	0	17226	14	0	0	0,00%
PDK	7.264	0,38	0	7264	17	0	0	0,00%
PIB	44.537	2,34	0	44537	7	0	0	0,00%
PNBK	48.868	2,57	0	48868	6	0	0	0,00%
Partai Demokrat	121.665	6,39	0	121665	2	1	1	11,11%
PKPI	43.102	2,26	0	43102	8	0	0	0,00%
PPDI	19.741	1,04	0	19741	12	0	0	0,00%
PPNUI	866	0,05	0	866	24	0	0	0,00%
PAN	20.456	1,07	0	20456	11	0	0	0,00%
PKPB	79.924	4,20	0	79924	4	1	1	11,11%
PKB	27.050	1,42	0	27050	9	0	0	0,00%
PKS	18.837	0,99	0	18837	13	0	0	0,00%
PBR	2.260	0,12	0	2260	23	0	0	0,00%
PDI-P	999.889	52,50	4	153401	1	1	5	55,56%
PDS	13.181	0,69	0	13181	15	0	0	0,00%
Golkar	320.710	16,84	1	109088	3	1	2	22,22%
Partai Patriot Pancasila	4.249	0,22	0	4249	20	0	0	0,00%
PSI	3.715	0,20	0	3715	22	0	0	0,00%
PPD	4.651	0,24	0	4651	19	0	0	0,00%
Partai Pelopor	23.686	1,24	0	23686	10	0	0	0,00%
TOTAL	1904600	100,00	5	846490		4	9	100%

Sumber: KPU, 2004, dikutip dari laporan IFES, 2004

Secara umum, suara Golkar menurun drastis di seluruh wilayah Bali. Di beberapa daerah, basis-basis pendukung Golkar masih mendukung partai ini ditengah kuatnya arus perubahan. Dalam konteks Pemilukada, seperti di Badung, Karangasem, dan Gianyar, Golkar dengan berkoalisi berhasil memenangkan calon-calonnya. Bahkan di Karangasem hingga saat ini dikenal sebagai basis Golkar yang kuat. Hal ini menunjukkan kecenderungan kuatnya watak konservatif masyarakat Bali, jika dilihat dari massifnya

dukungan yang bergeser dari Golkar, ke PDI Perjuangan, kemudian kembali lagi ke Golkar dalam momen Pemilu dan Pemilukada di Bali.

Demokrat bahkan mampu mencuri satu kursi DPR RI dalam Pemilu 2004. Partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono ini muncul sebagai pemain baru secara nasional, dan mendapat dukungan sebagian kecil masyarakat. Secara umum, kemenangan ini tak dapat dilepaskan dari sosok Jero Wacik, mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2004, dan kini menjabat sebagai

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia. Pada 2009 bahkan dukungan bagi Demokrat meningkat secara mencolok. Sosok SBY sebagai presiden dengan Partai Demokratnya berimbas positif. Kampanye keberhasilan dalam pemerintahan yang dipimpinya, dengan pemberantasan korupsi, dan program-program pemberantasan kemiskinan yang diiklankannya di televisi nasional berperan penting dalam mendongkrak suara bagi Partai Demokrat.

Di Bali sendiri kecenderungan konservatif ini muncul pasca serangan bom di Bali. Kondisi perekonomian di Bali memburuk akibat menurunnya jumlah wisatawan disusul terbitnya *travel warning* dari negara seperti Australia dan Amerika Serikat. Rangkaian serangan bom ini mendapatkan respon-respon yang semakin menegaskan identitas Bali. Diskursus fundamentalisme dan radikalisme, melalui terorisme Islam memunculkan respon keras dari masyarakat. Kemunculan satuan pengaman Adat, dan makin negatifnya sentimen terhadap warga pendatang menunjukkan watak konservatif dari masyarakat Bali. Usaha-usaha untuk menegaskan kembali identitas ke-Bali-an

muncul dengan kulminasinya melalui Ajeg Bali. Ajeg Bali berisi suatu himbauan yang pada prinsipnya dinyatakan dengan konsep perlunya menegakkan dan mengukuhkan kembali nilai-nilai Bali. Inti kampanye Ajeg Bali berisi suatu himbauan, yang, pada hakikatnya menegaskan kembali suatu praktik *othering*, dengan melekatkan pra-anggapan buruk terhadap orang-orang bukan Bali. Kampanye ini meluas, dan secara terbuka dimobilisasi oleh stasiun TV Lokal Bali, BaliTV, dan diberitakan secara berkala di harian cetak dengan oplah terbesar di Bali, Bali Post.

Isu tentang Ajeg Bali ini disambut hangat dalam masa-masa pasca bom. Ketika industri pariwisata kembali bangkit, Ajeg Bali telah menjadi suatu normalitas baru yang diterima masyarakat. Sekali lagi, hal ini menegaskan betapa perubahan yang radikal dianulir dalam kerangka keajegan (*statis*) masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh karakter wacana Ajeg Bali. Secara langsung hal ini juga ditunjukkan dengan bagaimana perolehan kursi dan kemenangan pada Pemilu Daerah, baik Gubernur maupun Walikota-Bupati yang berlangsung di Bali.

Tabel 8.

Perbandingan Komposisi Perolehan Kursi Partai Politik di Tingkat Provinsi Bali dalam Pemilu Th. 2004-dan Th.2009

No.	Nama Parpol	2004	2009	Ket.
1.	PDI-P	30	24	turun 6 kursi
2.	Golkar	14	12	Turun 2 kursi
3.	Demokrat	3	10	Naik 7 kursi
4.	Gerindra	-	2	Pendatang baru
5.	PNBK	1	2	naik 1 kursi
6.	Hanura	-	1	Pendatang baru
7.	PKPB	3	1	Turun 2 kursi
8.	Pakarpangan	-	1	Pendatang baru
9	PKPI	-	1	
10	PNI Marhenisme	2	1	Turun 1 kursi
11	PPP	1	-	
12	PPIB	1	-	
	Jumlah	55	55	

Sumber: Wisnumurti, 2009

Tabel 9.

Komposisi Kepala Daerah tingkat I dan II di Bali 2004-2009

No.	Provinsi/Kabupaten Kota	Kepala Daerah diusung oleh Parpol	Keterangan
1.	Bali	PDI-P	
2.	Denpasar	PDI-P	
3.	Badung	Golkar + Koalisi	
4.	Tabanan	PDI-P	
5.	Jembrana	PDI-P	Sudah Keluar
6	Buleleng	PDI-P	
7.	Karangasem	Golkar + Koalisi	
8.	Kelungkung	PDI-P	
9.	Bangli	PDI-P	
10.	Gianyar	Golkar + Koalisi	

Sumber: Wisnumurti, 2009.

KESIMPULAN

Dari hasil analisa diatas, kita dapat melihat pola kontinuitas dari orientasi aliran di Bali. Hal ini sekaligus menekankan relevansi pembacaan aliran politik di tingkat lokal. PDI Perjuangan dilihat sebagai inkarnasi PNI, dengan menekankan kedekatan Megawati Soekarnoputri dengan masyarakat Bali. Sebagai putri Soekarno, Megawati berhasil mendorong pilihan masyarakat Bali kepada PDI Perjuangan. Meski demikian, pilihan di tingkat lokal menunjukkan pola pilihan di tingkat nasional, sehingga konfigurasi politik lokal dapat dipahami sebagai cermin dari politik nasional. Isu dan kampanye di tingkat nasional memengaruhi pola pilihan di tingkat lokal. Masyarakat Bali masih melihat pentingnya memiliki representasi didalam pemerintahan.

Dari hasil Pemilu juga tampak kecenderungan pilihan masyarakat Bali kepada partai dengan orientasi sekuler. Sebagai minoritas Hindu, masyarakat Bali berkepentingan untuk mendukung yang menjamin keberadaannya. Masyarakat Bali juga masih dipengaruhi oleh pola pengelompokan tradisional, sehingga ikatan-ikatan masih primordial kuat memengaruhi pilihan partai politik. Secara umum, Periode

Pemilu 2004 dan 2009 menunjukkan kecenderungan partai-partai berusaha kembali menggerakkan semua *cleavages* yang ada dalam masyarakat melalui kampanye-kampanye. Hal ini mengakibatkan jarak ideologis semakin sempit dalam menimbang dan melihat platform partai.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswedan, A. (2004). *Political Islam in Indonesia*. Asian Survey Vol. 5, hal. 669-690.
- Dwipayana, A. (2004). *Bangsawan dan Kuasa, Kembalinya Dua Ningrat di Dua Kota*. Yogyakarta: IRE Press
- Feith, H. & L. Castle. (1970). *Indonesia Political Thinking 1945-1965*. Ithaca: Cornell University Press
- Geertz, C. (1977). *Penjaja dan Raja Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia*. Jakarta: KPG
- King, D. Y. (2003). *Half-Hearted Reform. Electoral Institutions and the Struggle for Democracy in Indonesia*. Westport, Connecticut: Praeger.

Lipset, S. M. & S. Rokkan.(1967). *Cleavages Structures, Party Systems, and Voter Alignments*. New York: Free Press

Robinson, G. (2006). *Sisi Gelap Pulau Dewata, Sejarah Kekerasan Politik*. Yogyakarta: LKIS

Wisnumurti, O. (2009). *Peta Politik Nasional dan Lokal*. Makalah yang disampaikan dalam rangka Pendidikan dan Animasi Politik Kaum Muda se-Keuskupan Denpasar, 23-25 Oktober, 23-25 November 2009.